

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussamad, H. Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021
- Adami Chazawi. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Aceh: Bayumedia Publishing, 2011.
- Ali, Z. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021
- Amir Ilyas dan Jupri. *Justice collaborator: strategi mengungkap tindak pidana korupsi*. Genta Publishing, 2018.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
- Andi Hamzah. *Korupsi di Indonesia: masalah dan pemecahannya*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Andi Hamzah. *Pemberantasan korupsi: melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Barda Nawawi Arief, S. H. *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra AdityaBakti, 2000.
- CST Kansil. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. , Jakarta: Balai Pustaka, 1979.
- Eko Soponyono. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Pohon Cahaya, 2012.
- Emzir, M., & Pd, M. *Metodologi penelitian kualitatif analisis data*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Firman Wijaya. *Whistleblowers dan justice collaborator dalam perspektif hukum*. Jakarta: Penaku, 2012
- Hadjon, P. M. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan*

- pembentukan peradilan administrasi negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- J.E Sahetapy. *Viktimologi: sebuah bunga rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, 2018.
- Lilik Mulyadi. *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: PT. Alumni, 2022.
- Muhadar, dkk. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. *Metode Penelitian*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- R. Wiyono. *Pembahasan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soemitro, R. H. *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 167, 1990.
- Suharsimi, A. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 134, 252, 2006.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi Transnasional yang Terorganisasi, 2000)

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, PER/045A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01/55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Saksi Pelaku yang Bekerja Sama.

C. JURNAL DAN ARTIKEL

Asri, D. P. B. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” JIPRO: Journal of Intellectual Property, 2018.
- Ichsan, T. N. “Pengamanan Hukum Terhadap Status *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2021.
- Julianto, B. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” Jurnal Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Lex Renaissance, 2020.
- Krisdayanti, A. “Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. *Lex Renaissance*, 7(4), 803-818. 2022
- Manalu, River Yohanes. ”*Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Lex Crimen* Vol. IV/No.1. 2015
- Rahardian, F. N., & Pujiyono, S. “Praktek Pemidanaan Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana yang Bekerja Sama/*Justice Collaborator* (Telaah Yuridis Putusan No. 14/Pid. B/Tpk/2011/Pn. Jkt. Pst Pengadilan Tipikor Jakarta).” *Diponegoro Law Journal*, 2012.
- Wibowo, D. A. “Peranan Saksi Mahkota dalam Peradilan Pidana di Indonesia.” Jurnal Hukum dan Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011.

D. WEBSITE/INTERNET

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, https://kbbi.web.id/perlindungan#google_vignette diakses pada Jumat, 22 Maret 2023 pukul 18.26 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> diakses Pada Jumat, 22 Maret 2023 pukul 18.30 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, <https://kbbi.web.id/saksi> diakses pada Minggu, 24 Maret 2024 pukul 10.37 WIB

Ahmad Sofian. “*Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya*“, Binus University Bussiness Law, diakses dari <https://bussines-law.ac.id> pada Minggu, 19 Mei 2024 pukul 13.54 WIB.

E. SKRIPSI/DISERTASI/TESIS

Bahrudin Machmud. “Analisis Hukum Pidana Terhadap Keringanan Pidana Bagi *Justice Collaborator* dalam Pasal 10A ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.” Skripsi UIN Walisongo.

Banjarsari, Indah. “Kewenangan Hakim dalam Menetapkan Status *Justice Collaborator* yang Telah Ditetapkan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2017

Cahyo, Prabowo Hario Tri. “Program Perlindungan *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Program Studi Kriminologi Universitas Indonesia. 2018.

Muharikin, I. M. “Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas *Non Self Incrimination*.” Tesis Brawijaya University, 2015.

Prasetyo, A. “Perlindungan Hukum Dan Penanganan Khusus Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Pada Tindak

- Pidana Korupsi Dalam Prospektif Hukum Pidana di Indonesia.” Tesis Universitas Airlangga, 2020.
- Pratiwi, Salsabila Dewi. “Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Pada Proses Peradilan Pidana”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2021
- Saleh, N. “Kajian Yuridis Terhadap *Justice Collaborator* dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Tesis Universitas Hasanuddin).” Universitas Hasanuddin, 2013.
- Sutanti, R. D., & NIM, S. “Kebijakan Formulasi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Sebagai Alasan Peringanan Pidana Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Nasional.” *Doctoral dissertation*, Universitas Diponegoro, 2012.